

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menemukan bahwa Nusantara Fund merupakan inisiatif pendanaan iklim berbasis masyarakat sipil yang mengadopsi prinsip *direct access climate finance*, yaitu mekanisme pendanaan yang memberikan akses langsung kepada komunitas lokal tanpa melalui birokrasi lembaga multilateral yang kompleks. Melalui pendekatan ini, Nusantara Fund menjawab kesenjangan struktural dalam arsitektur pendanaan iklim global yang selama ini cenderung sulit dijangkau oleh masyarakat adat dan komunitas lokal. Nusantara Fund menunjukkan upaya untuk mengadopsi prinsip-prinsip standar pendanaan iklim internasional seperti *fiduciary standards, environmental and social safeguards*, serta *gender policy*. Hal ini tercermin melalui pembentukan struktur tata kelola yang melibatkan organisasi masyarakat sipil seperti AMAN, KPA, dan WALHI, penerapan pedoman pengelolaan keuangan, mekanisme audit independen, serta penyediaan sistem pengaduan publik yang bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Selain itu, adanya kebijakan perlindungan sosial dan lingkungan serta pengarusutamaan gender juga menunjukkan upaya Nusantara Fund untuk mengintegrasikan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam mekanisme pendanaannya.

Lebih jauh, jika dianalisis melalui kerangka *Indigenous Climate Justice*, khususnya prinsip *self-determination*, Nusantara Fund menunjukkan potensi dalam memperkuat kapasitas kolektif IPLCs untuk menentukan arah pembangunan dan respons terhadap perubahan iklim. Mekanisme pendanaan yang berbasis inisiatif komunitas, proses musyawarah di tingkat tapak, serta pengakuan terhadap pengetahuan lokal menunjukkan bahwa IPLCs tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai aktor utama dalam pengelolaan program. Dengan demikian, Nusantara Fund dapat dipahami sebagai inovasi penting dalam memperluas akses pendanaan iklim yang lebih adil dan berbasis komunitas di Indonesia. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas Nusantara Fund dalam mendorong keadilan iklim masih menghadapi beberapa keterbatasan. Keberhasilan implementasi Nusantara Fund masih sangat dipengaruhi oleh peran organisasi masyarakat sipil yakni AMAN, KPA dan WALHI. Selain itu, distribusi penerima manfaat masih terbatas pada komunitas yang

telah terorganisir dalam jaringan organisasi tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keadilan iklim yang dihasilkan masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya inklusif bagi seluruh IPLCs di Indonesia. Skala pendanaan yang relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan iklim nasional, kerentanan atas ketergantungan pada dukungan filantropi global, serta dinamika struktural terkait pengakuan wilayah adat dan tata kelola sumber daya alam di Indonesia juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari inisiatif ini. Oleh karena itu, meskipun Nusantara Fund menunjukkan potensi sebagai model pendanaan berbasis komunitas yang inovatif, penguatan dukungan kelembagaan dan kebijakan tetap diperlukan agar kontribusinya terhadap keadilan iklim dapat berkembang secara lebih luas.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan kebijakan maupun penelitian selanjutnya. Pertama, bagi pengelola Nusantara Fund, diperlukan upaya untuk memperluas skala pendanaan serta memperkuat kapasitas kelembagaan agar inisiatif ini dapat menjangkau lebih banyak komunitas adat dan lokal di Indonesia. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengembangkan strategi *outreach* yang lebih inklusif serta memperkuat mekanisme identifikasi komunitas yang belum terjangkau. Selain itu, penguatan sistem monitoring, evaluasi, serta mekanisme perlindungan sosial dan lingkungan di tingkat tapak juga penting untuk memastikan bahwa implementasi program tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan iklim. Kedua, Organisasi pendamping seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Konsorsium Pembaruan Agraria, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia perlu terus memperkuat kapasitas pendampingan kepada IPLCs, khususnya dalam pengelolaan keuangan, pengukuran dampak, serta penguatan kelembagaan komunitas. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan komunitas dan mendorong tercapainya *self-determination* yang lebih substansial.

Ketiga, bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, penelitian ini menunjukkan pentingnya mendukung mekanisme pendanaan berbasis komunitas sebagai bagian dari strategi nasional dalam menghadapi perubahan iklim. Pemerintah dapat mendorong integrasi pendekatan *direct access* dalam kebijakan pendanaan iklim nasional serta memperkuat pengakuan terhadap hak IPLCs. Dukungan kebijakan ini penting untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan inisiatif seperti Nusantara Fund berkembang secara lebih luas dan berkelanjutan. Keempat, bagi penelitian selanjutnya,

kajian mengenai Nusantara Fund masih dapat dikembangkan lebih lanjut, mengeksplorasi dampak jangka panjang dari pendanaan berbasis komunitas terhadap keadilan iklim, serta membandingkan Nusantara Fund dengan skema pendanaan serupa di tingkat global. Selain itu, penelitian yang lebih mendalam mengenai pengalaman komunitas penerima manfaat juga penting untuk memahami dinamika implementasi di tingkat tapak secara lebih komprehensif.